

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.84/KU.005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 24 Januari 2019

 INSPEKTUR JENDERAL 


WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.84/KU.005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 24 Januari 2019

INSPEKTUR JENDERAL



WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHJU SATRIO UTOMO
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2019

PIHAK KEDUA,
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

PIHAK PERTAMA,
Inspektur Jenderal 

WAHJU SATRIO UTOMO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHJU SATRIO UTOMO
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2019

PIHAK KEDUA,
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

PIHAK PERTAMA,
Inspektur Jenderal

WAHJU SATRIO UTOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	1 Ditetapkannya pedoman pengawasan internal	%	100
		2 Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2019 - 2024	Laporan	1
2	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	3 Tingkat maturitas elemen Internal Audit Capability Model (tata kelola pengawasan) yang mencapai level 3	%	100
		4 Pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	80
3	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	5 Aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	93
		6 Peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,80
4	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	7 Pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi	%	100
5	Terselenggaranya Kegiatan Kehumasan	8 Terpublikasinya kegiatan Inspektorat Jenderal	Laporan	12
6	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	9 Kualitas pelaksanaan anggaran	%	95
7	Terwujudnya Good Governance di lingkungan ITJEN	10 Implementasi SAKIP ITJEN	Nilai	82
		11 Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	3
8	Terwujudnya Good Governance di lingkungan Kemenhub	12 Kebocoran Keuangan Negara	%	0,35
		13 Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	90

Kegiatan :
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Anggaran :
Rp. 107.671.530.000

Disetujui,
Jakarta, 24 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU S. UTOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	1 Ditetapkannya pedoman pengawasan internal	%	100
		2 Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2019 - 2024	Laporan	1
2	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	3 Tingkat maturitas elemen Internal Audit Capability Model (tata kelola pengawasan) yang mencapai level 3	%	100
		4 Pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	80
3	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	5 Aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	93
		6 Peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,80
4	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	7 Pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi	%	100
5	Terselenggaranya Kegiatan Kehumasan	8 Terpublikasinya kegiatan Inspektorat Jenderal	Laporan	12
6	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	9 Kualitas pelaksanaan anggaran	%	95
7	Terwujudnya Good Governance di lingkungan ITJEN	10 Implementasi SAKIP ITJEN	Nilai	82
		11 Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	3
8	Terwujudnya Good Governance di lingkungan Kemenhub	12 Kebocoran Keuangan Negara	%	0,35
		13 Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	90

Kegiatan :
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Anggaran :
Rp. 107.671.530.000

Disetujui,
Jakarta, 24 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI



INSPEKTUR JENDERAL 

WAHJU S. UTOMO